

**MENGANGKAT MARWAH KAUM PEREMPUAN
DAN MENINGKATKAN KETANGGUHANNYA
DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI**

Oleh: Tenas Effendy

MENGANGKAT MARWAH KAUM PEREMPUAN DAN MENINGKATKAN KETANGGUHANNYA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Orangtua-tua Melayu mengatakan: "*elok langit karena berbulan, elok bumi berkayu kayan, elok laut karena berikan, elok bangsa karena perempuan*". Ungkapan ini mencerminkan nilai budaya Melayu yang menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang mulia, memandangnya dengan penuh hormat, sehingga mereka mengutamakan kaum perempuan dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam ungkapan adat ditegaskan lagi: "*adat hidup berkampung halaman, seiya sekata lelaki perempuan*", atau dikatakan: "*bertuah hidup berkaum bangsa, lelaki perempuan seiya sekata*" atau dikatakan: "*tanda Melayu memegang adat, lelaki perempuan setimbang sesukat*". Ungkapan-ungkapan ini secara mendasar menunjukkan, bahwa hakikatnya antara kaum lelaki dan perempuan *ada kesetaraan* dan saling isi mengisi, saling bantu membantu, saling hormat menghormati dalam arti yang luas. Asas ini, memperlihatkan, bahwa kaum perempuan bukanlah kaum yang dipandang rendah atau direndahkan, tetapi dianggap setara dalam kehidupan bermasyarakat.

Indikasi kesetaraan itu, semakin dikokohkan dengan adanya ketentuan adat yang memberi hak-hak khusus bagi kaum perempuan di dalam melaksanakan upacara adat dan tradisi, yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang kadangkala "*lebih tinggi*" dari kaum lelaki. Kehormatan dan penghormatan

terhadap kaum perempuan dalam adat resam Melayu Riau sudah diwariskan sejak dahulu. Bahkan, sudah dibakukan ke dalam beragam ungkapan adat dan tradisi serta diberlakukan dalam adat istiadatnya.

Di dalam cerita-cerita rakyat daerah Riau, banyak sekali dijumpai kisah-kisah yang mengekalkan keutamaan kaum perempuan, yang menempatkan mereka pada kedudukan tinggi dan mulia. Gelar "*Cik Puan*", gelar "*Puan*" bahkan "*Tun*" (yang lazim diberikan kepada kaum lelaki) diberikan pula kepada kaum perempuan yang memiliki keutamaan, sehingga kesejajaran dan kesetaraan antara lelaki dan perempuan semakin mengental.

Namun, di dalam hal-hal tertentu, adat membedakan pula sejauh mana kedudukan kaum perempuan dibatasi dan tidak dapat disamakan dengan kaum lelaki, karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang dianut masyarakat adat. Misalnya, di dalam urusan yang mengutamakan kekuatan fisik, kaum perempuan memang tidak disamakan sesuai dengan kodratnya. Perbedaan lainnya diberlakukan bila dianggap dapat menjatuhkan marwah perempuan atau dianggap dapat menimbulkan permasalahan bagi perempuan, seperti menjadi: "*kuli*" atau "*pekerja kasar*", menjadi "*hamba sahaya orang*", menjadi "*budak piaraan orang*", atau menjadi "*alat permainan kaum lelaki*", dll.

Dari sisi lain, kaum perempuan mendapat pula tempat dan kedudukan utama, seperti dalam hal ihwal adat istiadat (mengepalai kelengkapan adat istiadat dalam perkawinan, menentukan alat kelengkapan dalam penobatan, pengukuhan kepala adat, menentukan alat kelengkapan upacara pengobatan tradisional dll), di dalam urusan pendidikan dan sosial, di dalam pengaturan rumah tangga dan keluarga. Bahkan tidak jarang kaum perempuan tampil sebagai "*laskar*" dan "*hulubalang*" karena merekapun diberi kesempatan untuk memiliki beragam ilmu

ketahanan diri dan fisik, baik untuk mempertahankan diri dan kehormatannya, maupun untuk mempertahankan keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Itulah sebabnya kaum perempuan Melayu masa silam memiliki keberanian besar, sehingga mereka tidak bimbang dalam menghadapi berbagai cabaran hidup, baik di daratan maupun di laut.

Sejarah juga membuktikan, bahwa kaum perempuan pernah menjadi “*ratu*”, memerintah kerajaan seperti “*Ratu Bintang Sri Benar*”, atau menjadi pemegang “*cogan kerajaan*” seperti “*Tengku Hamidah*” di kerajaan Riau Lingga yang berkedudukan di pulau Penyengat. Demikian juga dengan “*Cik Puan Sri Kampar*” dari kerajaan Pekantua Kampar yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Portugis awal abad ke 16 bersama Sultan Mahmud Syah I, Hang Nadim, Nara Singa, dan sebagainya. Nama lain, adalah “*Cik Puan*” dari kesultanan Pelalawan, yang dengan gigih melawan desakan Belanda untuk menandatangani Politik Kontrak dengan kerajaan Pelalawan pada pengujung abad ke 19. Kesemuanya itu menunjukkan betapa kaum perempuan sejak dahulu tidak hanya berada di “dapur” tetapi juga berperan penting dalam percaturan politik dan pemerintahan.

II. KESETARAAN JENDER DALAM ADAT MELAYU RIAU

Walaupun adat Melayu dalam hal-hal tertentu membedakan antara lelaki dengan perempuan, namun pembedaan itu tidaklah bermakna merendahkan, tetapi sebaliknya, menunjukkan adanya keseimbangan, atau bahkan mengutamakan kaum perempuan. Ungkapan adat yang mengatakan: “*anak jantan timang-timangan, anak perempuan sanjung-sanjungan*”, memberi petunjuk adanya kesetaraan antara lelaki dan perempuan. Di dalam ungkapan lain disebutkan: “*anak lelaki cahaya negeri, anak perempuan permata intan*”; atau dikatakan: “*anak lelaki payung*

negeri, anak perempuan pelita budi". Ungkapan-ungkapan sejenis ini banyak sekali ditemui di dalam budaya Melayu, yang intinya mengacu kepada kesetaraan yang adil antara kaum lelaki dan kaum perempuan. Di dalam "tunjuk ajar" Melayu selalu diangkat ungkapan: "*yang lelaki bagaikan matahari, yang perempuan bagaikan bulan*"; atau dikatakan: "*karena perempuan negeri aman, karena lelaki tuah berdiri*"; atau dikatakan: "*pada diri perempuan banyaklah contoh teladan*".

Ketika Sultan Mahmud Syah I dinobatkan menjadi Raja Pekantua Kampar (1526 M) setelah beliau terhalau oleh Portugis dari Melaka, isterinya, Tun Fatimah memberikan dorongan semangat juang kepada suaminya dengan mengatakan: "*walaupun Melaka sudah jatuh ke tangan Portugis, namun tuah dan marwah Melayu hendaklah ditegakkan dan dikekalkan sampai keanak cucunya...*". Kemudian Tun Fatimah mengucapkan se bait pantun yang terkenal:

*"Tumbuh rumput di tepi pagar
Dimakan rusa kan lapar juga
Tujuh laut boleh terbakar
Sampan kita berlayar juga"*

Ucapan Tun Fatimah yang membakar semangat juang Sultan Mahmud Syah I beserta para pembesar kerajaan, menyebabkan perjuangan melawan Portugis terus berlanjut sampai ke akhir hayatnya, bahkan kemudian diteruskan oleh puteranya Sultan Alauddin Riayat Syah II yang membangun kerajaan Johor sebagai pewaris Melaka. Dan dengan ucapan itu pula Tun Fatimah kemudian digelar "*Cik Puan Sri Kampar*", sebagai penghormatan atas semangat juangnya yang pantang menyerah, dan menjadi lambang keperkasaan kaum perempuan Melayu. Gelar "*Cik Puan*" ini pula yang kemudian sering dipakai sebagai tanda penghargaan bagi kaum perempuan Melayu dalam generasi berikutnya.

Sejarah Riau juga mencatat, dengan dorongan Tun Fatimah itu pula Sultan Mahmud Syah I bertetap hati untuk mempertahankan alam Melayu yang diporakporandakan Portugis. Ketika beliau meresmikan kubu terakhir Melaka di Kerumutan Kampar, beliau berkata dalam pantunnya yang terkenal:

*“Pulau Sarap pulau Sejugi
Ketiga dengan si pulau Pinang
Walaupun lesap mahkota kami
Marwah Melayu tidakkan hilang”*

Kesetaraan jender ini terwujud karena hakikatnya budaya Melayu adalah budaya yang bersehati dengan ajaran Islam, yang menjunjung tinggi dan dan mengutamakan kaum perempuan. Ungkapan adat yang mengatakan: *“adat bersendi syarak, syarak bersedni kitabullah”* atau *“adat sebenar adat ialah qur’an dan sunnah nabi”*, menunjukkan bahwa asas adat (budaya) Melayu adalah mengacu kepada ajaran Islam.

Kesetaraan itu, tercermin pula di dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yang memperlihatkan kesetaraan antara kaum lelaki dengan perempuan. Namun, kesetaraan itu tentulah tidak bersifat kesetaraan tanpa adanya ikatan dan ketentuan adat yang mengatur, tidak pula kesetaraan yang *“sama rata sama rasa”* tanpa batas, melainkan kesetaraan yang sesuai dengan nilai agama (Islam) dan nilai-nilai luhur adat istiadat (budaya) Melayu itu sendiri. Orangtua-tua mengatakan: *“walaupun hakikatnya antara lelaki dengan perempuan adalah sama, tetapi samanya bertempat-tempat, serupanya beratur-alur”*. Di dalam ungkapan adat dikatakan: *“di dalam sama ada bedanya, di dalam beda ada samanya”*; atau dikatakan: *“samanya tidak berpukul rata, bedanya tidak mencacat cela”*; atau dikatakan: *“samanya rasa merasa, bedanya setya sekata”*.

III. NILAI NILAI HUKUM ADAT MELAYU TENTANG JENDER

Adat istiadat atau adat resam Melayu mengatur sejauh mana hak dan batasan kesetaraan antara kaum perempuan dengan kaum lelaki. Ketentuan adat itu ada kalanya dituangkan ke dalam ketentuan-ketentuan khusus; ada kalanya dijabarkan ke dalam "*pantang larang*" yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya. Namun, intinya, adat Melayu tidaklah melakukan diskriminasi atau perbedaan yang cenderung melecehkan apalagi merendahkan kaum perempuan. Justeru sebaliknya, adat istiadat khasnya dan budaya Melayu umumnya, sangatlah menghormati dan memuliakan kaum perempuan. Dari asas "*menghormati*" dan "*memuliakan*" itu pula lahirnya ketentuasn-ketentuan adat yang penuh dengan simbol-simbol yang memerlukan pemahaman agar tidak "*tersalah faham*" atau "*tersalah tafsir*". Itulah sebabnya orangtua-tua Melayu mengingatkan, agar ketentuan adat yang diberlakukan, terutama yuang berkaitan dengan kaum perempuan perlu dicermati dan difahami secara mendalam, agar tidak terjadi kesalahan dan anggapan yang dapat menimbulkan kesan seakan-akan adat Melayu "*merendahkan*" kaum perempuannya.

Ketentuan adat dan "*pantang larang*" mengenai "*pembatasan perempuan keluar rumah*" misalnya, harus dilihat dari latar belakang mengapa ketentuan dan "*pantang larang*" itu diberlakukan. Ketentuan adat mengenai "*pembatasan kaum perempuan untuk bekerja kasar, menjadi kuli dan abdi orang dsb.ny*", harus ditinjau dari berbagai sisi, terutama dari sisi *harkat, martabat dan marwah* kaum perempuan itu sendiri. Demikian pula dengan "*pembatasan-pembatasan lainnya*" terhadap kaum perempuan, bukanlah dilatar belakangi oleh tindakan diskriminasi atau pelecehan terhadap kaum perempuan, tetapi sebaliknya intinya mengacu kepada upaya untuk menegakkan dan memelihara *harkat, martabat dan marwah*

kaum perempuan itu sendiri. Itulah sebabnya ungkapan adat mengatakan: “*Apa tanda Melayu jati, marwah perempuan ia hormati*”, atau dikatakan: “*Apa tanda Melayu pilihan, tahu memelihara marwah perempuan*”. Di dalam ungkapan lain dikatakan: “*Apabila hidup hendak terhormat, terhadap perempuan berhemat cermat*”; atau dikatakan: “*Apabila hidup hendak terpuji, perempuannya jangan diumpat keji*”; atau dikatakan: “*Apa tanda Melayu berbudi, perempuannya tidak dijadikan kuli*”; atau dikatakan: “*Apabila hidup hendakkan berkah, lelaki perempuan seiring langkah*”. Di dalam ungkapan selanjutnya dikatakan:

“Adat hidup sama sedusun, lelaki perempuan tuntun menuntun”

“Adat hidup sama sedesa, lelaki perempuan rasa merasa”

“Adat hidup sama sekampung, lelaki perempuan tolong menolong”

“Adat hidup sama senegeri, lelaki perempuan beri memberi”

“Adat hidup sama sebangsa, lelaki perempuan seiya sekata”

“Adat hidup sama sekaum, lelaki perempuan sama maklum”

“Adat hidup sama sesuku, lelaki perempuan sehilir sehulu”

Ungkapan-ungkapan di atas secara jelas memberi petunjuk bahwa antara kaum perempuan dan kaum lelaki memerlukan hubungan kesetaraan dan kebersamaan yang saling isi mengisi dan saling hormat menghormati, serta saling “*tahu diri*”.

IV. HUKUM ADAT MELAYU MENGHARAMKAN KEKERASAN DAN PERILAKU SEMENA-MENA TERHADAP KAUM PEREMPUAN.

Sampai saat ini, saya belum menemui adanya bentuk-bentuk kekerasan yang diberlakukan di dalam hukum adat Melayu umumnya, Melayu Riau khususnya terhadap kaum perempuan. Hukum adat Melayu tetaplah mengacu kepada asas

keadilan yang merata, yang menjunjung tinggi hak-hak setiap pribadi tanpa memandang gender. Itulah sebabnya hukum adat Melayu dalam arti luas, *mengharamkan kekerasan terhadap kaum perempuan*. Hukum adat, lazimnya mengatur sanksi hukum yang diberlakukan atas kesalahan atau pelanggaran adat, baik oleh lelaki maupun perempuan dengan asas keadilan sesuai menurut ajaran Islam dan nilai budaya yang mereka anut.

Karenanya, *tidaklah benar bila ada anggapan bahwa hukum adat Melayu melakukan tindakan semena-mena atau kekerasan terhadap kaum perempuan*. Dan tidaklah benar bila ada anggapan bahwa adat Melayu merendahkan atau menempatkan kaum perempuan sebagai “alat” dan “benda mati” yang dikungkung tanpa kebebasan dan sebagainya. Bahkan sebaliknya, hukum adat Melayu senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat, tuah dan marwah kaum perempuan, dan menempatkan mereka pada kedudukan yang terpuji dan dimuliakan.

Namun demikian, tidak mustahil ada orang yang beranggapan, bahwa hukum adat Melayu bersikap tidak adil atau cenderung merendahkan kaum perempuan. Menurut hemat saya, anggapan atau pendapat itu muncul, semata-mata karena ketidak fahaman mereka terhadap adat istiadat dan nilai-nilai hakiki budaya Melayu. Budaya Melayu, terutama adat istiadatnya, amat sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab dan islami. Karenanya, sangatlah keliru bila ada yang beranggapan bahwa adat Melayu menindas perempuan, sangatlah salah bila ada yang berfikir bahwa adat Melayu bersikap tidak adil dan membiarkan kekerasan atau kesewenang-wenangan terhadap kaum perempuan.

Orangtua-tua Melayu sejak dahulu berupaya untuk menempatkan kaum perempuan pada kedudukan mulia dan terpuji, mengagungkan mereka sebagai

kaum yang penuh kelemahan lembut dan memiliki kearifan serta perasaan yang halus. Banyak penulis dan pencerita Melayu yang melukiskan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan dengan keindahan lahiriah dan batiniah, yang ditakdirkan menjadi insan yang patut dan wajib disanjung dan dimuliakan. Perempuan dilambungkan bagaikan “bulan purnama” dengan keindahan yang gemilang, atau bagaikan “bintang kejora” yang kemilau, atau bagaikan “dewi kayangan” yang disanjung bagaikan “menating minyak yang penuh” dsb.nya. Banyak tradisi lisan Melayu yang mengagungkan kaum perempuan, dan mengutuk perilaku yang merendahkan harkat, martabat dan marwahnya.

Sebagaimana disebutkan di atas, adat dan budaya Melayu *mengharamkan* perilaku atau tindakan semena-mena, tindakan kekerasan dan sebagainya terhadap kaum perempuan. Karenanya hukum adat Melayu mengatur dan menetapkan *sanksi-sanksi berat* terhadap para pelaku tindakan semena-mena, kekerasan, pelecehan, dan sebagainya terhadap kaum perempuan. Untuk menjaga agar kaum perempuan tidak diperlakukan secara semena-mena, maka adat Melayu mengatur dan menetapkan ketentuan adat yang rinci yang mencakupi berbagai bidang dan sisi kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketentuan dimaksud, diberlakukan secara menyeluruh, dan dikukuhkan oleh para pemimpinnya, serta dilaksanakan dengan tegas tanpa pilih kasih.

Di dalam ungkapan adat dikatakan: “*Apabila perempuan dipermalukan orang, di situlah tempat nyawa melayang*”; atau dikatakan: “*Apabila perempuan diinjak dilapah, di situlah tempat berkuah darah*”; atau dikatakan: “*Siapa sengaja menganiaya perempuan, kepadanya jangan berlaku kasihan*”; atau dikatakan: “*Barang siapa merendahkan kaum perempuan, jauhkan ia dari pergaulan*”; atau dikatakan: “*Siapa kasar kepada perempuan, duduk di majelis jangan biarkan*” dst. Ungkapan lain mengatakan: “*Pantang perempuan direndahkan, pantang lelaki*

diumpat keji” atau dikatakan: “Panjang perempuan dinistakan, panjang jantan dipermalukan” dst.

Ketegasan sikap adat dan budaya Melayu terhadap perlakuan semena-mena, tindakan kekerasan, penganiayaan, pelecehan dan sebagainya terhadap kaum perempuan sudah diwarisi turun temurun. Dan adat dengan tegas melakukan sanksi hukum yang keras, bahkan sampai dikucilkan dari pergaulan atau dibuang dari kampung halamannya. Karenanya, bila dikaitkan dengan kehidupan masa kini, dengan banyaknya perbuatan semena-mena, tindakan kekerasan, pelecehan, penganiayaan, pemerkosaan dan pelanggaran hak asasi terhadap kaum perempuan, atau terjadinya “jual beli” perempuan atau “perbudakan” terhadap kaum perempuan, maka adat dan budaya Melayu tentulah dengan tegas *menolak, mengutuk* dan bahkan *mengharamkannya*. Sebagai masyarakat yang agamis, beradat dan berbudaya, masyarakat Melayu tidak dapat membiarkan semua perilaku yang buruk itu, dan harus mengikisnya secara menyeluruh. Kepada para pelakunya wajiblah dilakukan tindakan tegas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penghapusan perilaku buruk itu amatlah perlu dipertegas dan didukung oleh masyarakat adat dengan memberlakukan hukum adat dan norma-norma sosial yang masih hidup dan dianut masyarakat. Ketegasan hukum baik hukum positif maupun hukum adat, seharusnya diberlakukan terhadap para pelanggar hukum atau mereka yang memperlakukan kaum perempuan secara tidak manusiawi, semena-mena dan sebagainya itu. Termasuk keteragasan sikap untuk menindak para calo TKW dan sejenisnya, yang secara langsung atau tidak menyebabkan kaum perempuan dijadikan sebagai “barang dagangan” atau dijadikan “alat pemuas nafsu” dan sebagainya yang sangat bertentangan dengan kaidah agama, adat dan budaya Melayu.

Berkaitan dengan hal di atas, Lembaga Adat Melayu Riau dengan tegas menghimbau semua pihak untuk menjaga marwah kaum perempuan, menjaga harkat dan martabatnya, dan memelihara nama baiknya. Karenanya, Lembaga Adat Melayu Riau menghimbau semua pihak yang selama ini cenderung menjadikan kaum perempuan sebagai "alat komersial", yang kadangkala "memperjualbelikan" kaum perempuan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri dengan berbagai kedok dan alasan. Lembaga Adat Melayu Riau semua perusahaan, biro-biro atau penyalur TKI, instansi pemerintah dan sebagainya, agar benar-benar memperhatikan, memelihara dan menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan, serta memperlakukan mereka secara manusiawi dan beradab.

Lembaga Adat Melayu Riau juga menghimbau semua hotel, objek wisata, tempat hiburan dan sebagainya, agar tetap menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan, serta menutup peluang terjadinya perbuatan maksiat dan keji terhadap mereka.

Bahwa gerakan pemberantasan tindakan semena-mena, tindakan kekerasan, pelecehan terhadap kaum perempuan dan sebagainya, hendaklah dilakukan secara berkesinambungan, serta didukung oleh semua pihak, seperti para aparat pemerintah dan penegak hukum, para ulama, tokoh masyarakat, kaum ibu, LSM, mahasiswa, generasi muda dan sebagainya. Gerakan ini hendaknya berbasis di bawah (peringkat desa dan kecamatan), tidak hanya di lapisan atas saja. Sebab tidak mustahil yang banyak menjadi "korban" adalah kaum perempuan pedesaan yang selalu terbuai oleh bujukrayu calo-calo yang menjanjikan pekerjaan atau harapan-harapan hampa.

V. UPAYA MENGGANGKAT MARWAH KAUM PEREMPUAN DAN MENINGKATKAN KETANGGUHANNYA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI.

Dari uraian di atas kelihatan, bahwa kaum perempuan dalam pandangan budaya Melayu seharusnya mendapat tempat yang terhormat, baik dalam pergaulan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun dalam menghadapi lapangan kerja, dan usaha dalam arti yang seluas-luasnya.

Kehidupan masa kini dan masa depan yang lazim disebut sebagai era globalisasi, adalah kehidupan yang penuh cabaran, dan sarat dengan persaingan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin membuka peluang munculnya beragam cabaran dan tantangan dalam hidup dan kehidupan manusia. Untuk itu tentulah diperlukan ketangguhan setiap pribadi agar tidak menjadi "korban" dari perputaran zaman yang kian deras dan keras itu. Dalam hal ini, sepatutnya kaum perempuan memerlukan perhatian khusus, agar mereka tidak dijadikan "alat" untuk kepentingan "duniawi" atau menjadi "alat permainan komersil" yang akan merusak binasakan harkat dan martabatnya. Karenanya, diperlukan upaya-upaya yang dapat mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabatnya, serta menempatkan mereka pada tempat yang layak sebagai kaum terhormat. Dengan demikian diharapkan kaum perempuan mendapatkan peluang untuk mendharmabaktikan dirinya, fikiran dan kemampuannya dalam membangun kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Walaupun kaum perempuan sudah banyak yang tampil dalam berbagai kegiatan, mulai dari dunia pendidikan, perniagaan, kemasyarakatan, keagamaan, tentara dan polisi, bahkan di panggung politik dan sebagainya, namun kenyataan juga menunjukkan bahwa kaum perempuan masih banyak yang hidupnya masih

menjadi “permainan bisnis”, menjadi “pajangan komersial”, menjadi “pelayan nafsu”, menjadi kaum yang “terjajah” dan “kaum kelas dua” dan sebagainya. Kenyataan ini memang menyedihkan, karena bagaimanapun juga memberi petunjuk betapa kaum perempuan masih hidup dalam posisi yang nyaris “tidak berdaya”. Contoh yang menonjol dapat disimak dengan terjadinya “jualbeli” kaum perempuan sampai ke luar negeri. Terjadinya korban TKI dalam berbagai bentuk penganiayaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Terjadinya peningkatan prostitusi yang menelan korban remaja perempuan sampai ke desa-desa dan sebagainya, yang semuanya semakin mencemaskan kita semua. Apakah hal ini akan terus berlangsung tanpa adanya perlindungan hukum dan pemberdayaan terhadap kaum perempuan dimaksud.

Kenyataan juga menunjukkan, bahwa masih banyak terjadi “diskriminasi” terhadap kaum perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat leluasa menunjukkan kemampuan dan kebolehnya. Mereka masih selalu dijadikan “alat” atau bahkan “diperbudak” oleh bangsanya sendiri maupun bangsa asing, terutama yang bekerja sebagai TKI apalagi yang dijadikan pekerja seks. Padahal, baik agama, adat dan budaya maupun perundang-undangan kita melarang perilaku yang buruk itu, namun kenyataan tetaplah mengabaikan semuanya, sehingga kehidupan dan marwah kaum perempuan selalu dalam ancaman dan selalu dilecehkan.

Menyikapi hal-hal di atas, sudah selayaknya disegerakan upaya-upaya yang dapat “menyelamatkan” kaum perempuan dari berbagai cabaran masa kini dan masa depan. Upaya-upaya dimaksud dapat dilakukan antara lain:

01. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya upaya menjaga tuah dan marwah, harkat dan martabat kaum perempuannya, agar mereka tidak mengabaikan kaum perempuannya.

Selanjutnya menanamkan nilai-nilai hakiki agama dan budaya, agar kaum perempuannya "*tahu diri*" dan tahu pula menjaga dirinya agar tidak terjermus ke dalam limbah kenistaan.

02. Melakukan pembinaan mental spiritual agar kaum perempuan menjadi kaum yang beriman dan bertaqwa, serta memiliki "jatidiri" yang kental sesuai dengan agama dan budaya yang dianutnya.
03. Meningkatkan upaya pembinaan keterampilan, pendidikan dan peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat agar kaum perempuan menjadi kaum yang memiliki kemampuan setara dengan kaum lelaki dalam segala bidang.
04. Menyempurnakan Perundang-undangan tentang perlindungan terhadap kaum perempuan, memperketat peraturan dan penegakan hukum yang dapat melindungi kaum perempuan dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, meningkatkan upaya yang dapat meredakan terjadinya pelecehan dan perbuatan semena-mena terhadap kaum perempuan .
05. Mengokohkan organisasi-organisasi kaum perempuan agar mereka dapat berhimpun dan menyusun kekuatan untuk menyuarakan aspirasinya serta melindungi kaumnya dari berbagai ancaman, dan membela hak-hak mereka dalam arti yang luas.
06. Membuka peluang seluas-luasnya bagi kaum perempuan untuk meningkatkan peranannya dalam semua bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya, serta menghilangkan segala bentuk

“diskriminasi” yang tidak wajar dan berlebihan. Peluang ini dapat dirancang mulai dari peringkat terbawah sampai ke peringkat tertinggi, yang tentu saja mengacu kepada nilai-nilai hakiki agama dan budaya yang dianut masyarakatnya, dan tidak menyimpang dari kodratnya sebagai kaum perempuan sejati.

07. Melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kaum perempuan dalam semua peringkat masyarakat, yang dapat memberikan “tunjuk ajar” dan pemahaman terhadap hak-hak dan kewajiban mereka, serta pencernaan nilai-nilai hakiki dan budayanya.

Upaya-upaya dimaksud tentulah memerlukan pemikiran yang berpandangan jauh ke depan, memerlukan kajian dan kebijakan yang arif, yang harus didukung oleh semua pihak.

Kita menyadari, bahwa apapun harapan, gagasan, upaya dan sebagainya yang bertujuan untuk mengangkat marwah, menegakkan harkat dan martabat kaum perempuan, serta melindungi hak asasi kaum perempuan, maupun upaya untuk meningkatkan peranan kaum perempuan masa kini dan mendatang, apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari semua pihak (pemerintah dan non pemerintah) atau tidak dilandasi oleh keperibadian yang kokoh dari kaum perempuan itu sendiri, tentulah sulit untuk terwujud. Karenanya upaya-upaya untuk meningkatkan peranan kaum perempuan ini akan lebih berhasil apabila sejalan dengannya dilakukan pula upaya pembinaan mental dan moral, yakni menanamkan nilai-nilai agama dan budaya untuk menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat yang bertaqwa kepada Allah, berbudaya dan berakhlak mulia, berjatidiri serta “tahu diri”, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang memadai.

Kita pun menyadari, bahwa bangsa kita sekarang sedang mengalami berbagai krisis, baik krisis ekonomi, krisis politik, krisis penegakan hukum, krisis kepemimpinan dan sebagainya. Bahkan, yang paling merisaukan adalah terjadinya krisis moral dan pengikisan akhlak. Krisis moral inilah yang sulit dipulihkan, dan yang paling ampuh untuk meluluhlantakkan sendiri-sendiri kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menyadari, bahwa hukum apapun yang dibuat dan diberlakukan, upaya apapun yang dirancang dan dilaksanakan, tanpa dukungan moral yang baik tentulah sulit dilaksanakan. Apalagi menghadapi era globalisasi yang sangat terbuka, yang memberi peluang besar dalam pengikisan nilai agama dan budaya, apabila kaum perempuan tidak siap menghadapinya, tentulah mereka akan terus menerus menjadi “korban” zaman.

Kita menyadari pula, bahwa himpitan beban ekonomi semakin berat, derita kaum perempuan semakin besar, tanggungjawab mereka semakin banyak, sehingga mereka dituntut untuk mampu menjadi “penyelamat” rumahtangganya, dituntut untuk mampu bersaing dalam ruang lingkup yang lebih luas, dituntut untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Kesemuanya itu tentulah memerlukan landasan yang kuat, terutama landasan batiniahnya. Sebab, ke depan, dunia akan semakin “kejam” dan dengan tanpa belas kasihan akan melindas dan menelan siapa saja yang tidak siap bertarung. Di sinilah diperlukan kekuatan rohaniyah sebagai “tameng” dan “benteng” diri agar tidak hanyut dan larut dalam zaman yang semakin “gila” dan “kejam” itu. Karenanya, kaum perempuan sudah semestinya menyikapi cabaran ini dengan berpandangan jauh ke depan, menyikapinya dengan strategi dan kebijakan yang tepat, agar mereka dapat berperan secara lebih aktif dan lebih arif. Kepada kaum perempuan yang menghendaki peningkatan peranannya, tentulah perlu menyiapkan dirinya dengan sebaik dan secermat mungkin, tidak hanya sekedar menuntut dan berkeluh kesah, tetapi harus berani tampil dengan “jatitidiri” keperempuanan yang tangguh, yang mampu duduk sama

rendah dan tegak sama tinggi dengan siapapun juga dan dimanapun juga. Ketangguhan “jatidiri” yang kental dengan landasan iman dan taqwa itulah yang akan menjadi kekuatan besar kaum perempuan dimasa depan, yang mampu menghadapi perubahan zaman dan pergeseran nilai budaya.

Dari sisi lain, himpitan beban ekonomi, sebaiknya dihadapi dengan keimanan dan kesadaran tinggi agar tidak dijadikan alasan untuk “dikorbankan” atau “mau dikorbankan” oleh siapa juga. Karena ekonomi bukanlah segala-galanya, dan masih banyak pekerjaan halal yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tunjuk ajar Melayu mengingatkan: *“Jangan karena dunia hidup terhina, jangan karena perut marwah hanyut”*. Ungkapan yang blain menegaskan lagi: *“Apa tanda perempuan sejati, imannya kokoh budinya tinggi”*; atau dikatakan: *“Apa tanda perempuan terbilang, menghadapi cobaan tiada gamang”*. Selanjutnya orangtua-tua Melayu beramanah: *“Apabila hidup hendak terpuji, pandai-pandailah menjaga diri”*; *“Apabila hidup hendak terhormat, memilih kerja berhemat cermat”*; *“Apabila hidup hendak mulia, pandai-pandailah menjaga nama”*; *“Apabila hidup hendak bermarwah, berfikir dahulu sebelum melangkah”*.

VI. PENUTUP

Akhirnya kita berharap, kaum perempuan bangsa ini akan tetap menjadi perempuan yang bertuah, perempuan yang memiliki marwah, harkat dan martabat, serta berbakti kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita pun berazam, agar kaum perempuan tetap mampu menjaga diri dan keluarganya, memelihara nama baik kaum dan bangsanya, agar mereka tidak dilecehkan atau dijadikan “korban” orang-orang yang rakus, loba dan serakah, atau menjadi “korban nafsu” orang-orang yang bejat. Sebab tanpa kesadaran sendiri dan tanpa “jatidiri” dan “tahu diri”, kaum perempuan akan tetap menjadi “permainan” dunia,

Jan akan terus menerus berada diambang kenistaan. Pada merekalah sebenarnya diharapkan kesadaran itu, dan kepada merekalah sebenarnya terletak nasibnya. Sepanjang mereka memiliki keimanan yang kokoh, memiliki harga diri yang mulia, memiliki kemauan yang keras, memiliki kemampuan bersaing dan ilmu-pengetahuan, tentulah mereka akan dapat menghadapi cabaran hidup yang semakin keras dan “kejam” ini.

Pengalaman masa silam, dan kenyataan masa kini, sepatutnya dijadikan contoh, bagaimana banyaknya kaum perempuan hidup dalam lembah kenistaan, hidup sengsara sebagai korban kezaliman dan nafsu. Karenanya sudah saatnya kaum perempuan menegakkan kepala dan membulatkan tekadnya untuk tampil dengan kesetaraan yang wajar, agar hidup dan kehidupan mereka masa mendatang dapat lebih terhormat dan lebih dihormati orang. Agar mereka dapat mewariskan kebanggaan kepada anak cucunya dengan kebanggaan yang diridhoi Allah.

Kepada pihak penaja acara ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih.

Pekanbaru, 2002